

1. Perkembangan inflasi daerah dan atau perkembangan harga barang kebutuhan pokok dan penting, barang lainnya dan jasa serta risiko ke depan.

Inflasi di Kota Tangerang Selatan pada Triwulan II Tahun 2025 menunjukkan angka IPH mengalami pola U-shape, yaitu naik kemudian turun tajam (deflasi) kemudian pulih dengan terlihat fluktuasi harga komoditas musiman yang kuat. Kenaikan harga mayoritas disebabkan oleh komoditas yang tergantung pada musim panen (cabai rawit dan bawang merah) dan komoditas dengan permintaan tinggi (beras, daging sapi, telur ayam ras dan daging ayam ras).

Link grafik :<https://bit.ly/IPHTriwulanII2025>

2. Identifikasi permasalahan pengendalian inflasi di daerah.

Pada April, inflasi didorong oleh kenaikan harga beberapa komoditas utama akibat terbatasnya pasokan akibat gangguan distribusi dan lonjakan permintaan pasca-Idulfitri. Namun, kondisi berbalik pada akhir April dan berlanjut ke Mei 2025, di mana terjadi penurunan harga seiring meningkatnya pasokan karena panen. Pada Juni 2025, tekanan inflasi kembali muncul, dipicu oleh meningkatnya permintaan terhadap beras karena belum tersalurnya bantuan pangan dan daging ayam ras sebagai substitusi konsumsi pasca Idul Adha.

3. Pelaksanaan kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kota Tangerang Selatan telah melakukan beberapa upaya strategis, antara lain:

- Pemantauan dan stabilitas harga serta stok terhadap semua komoditas pangan strategis
- Operasi pasar minyakita di Pasar Ciputat dengan mengedukasi harga sesuai HET
- Peningkatan ketahanan pangan local komoditas cabai melalui RW Mantap
- Penyusunan kelayakan Pusat Logistik Pangan sebagai langkah konkrit untuk mewujudkan rencana pengelolaan stok dan distribusi melalui pusat logistik pangan
- Sosialisasi dan edukasi Masyarakat dengan stop boros pangan
- Optimalisasi komunikasi efektif melalui koordinasi dengan Pemerintah Pusat, salah satunya terkait percepatan teknis bantuan pangan beras dan daging ayam

4. Evaluasi kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

- Kota Tangerang Selatan menghadapi hambatan utama berupa keterbatasan lahan pertanian, sehingga sangat bergantung pada pasokan pangan dari luar daerah. Hal ini menyebabkan rentannya ketersediaan pasokan terhadap gangguan distribusi. Selain itu, belum tersedianya data pasokan pangan dan data agen/distributor/pemasok secara real-time menyulitkan pemerintah dalam mengantisipasi lonjakan harga secara dini, dan penilaian kecukupan pasokan untuk masyarakat serta pengawasan harga guna mencegah praktik persaingan usaha tidak sehat.
- Instruksi Presiden No. 1 Tahun 2025 menyebabkan keterbatasan anggaran daerah,

sehingga membatasi kapasitas pelaksanaan program pengendalian inflasi secara optimal.

- Ketidadaan peta jalan yang komprehensif dan terintegrasi membuat pelaksanaan program TPID tidak terarah. Hal ini berdampak pada rendahnya pemahaman anggota TPID terhadap prioritas dan cakupan program pengendalian inflasi.
- Meskipun telah dilakukan inisiasi kerja sama dengan beberapa kabupaten/kota penghasil pangan, belum ada tindak lanjut konkret dalam bentuk perjanjian atau mekanisme pemenuhan pasokan. Potensi stabilisasi harga melalui kolaborasi lintas daerah belum dimanfaatkan secara maksimal.

5. Rekomendasi kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

Kedepan, komitmen dan sinergi dari semua pihak perlu terus diperkuat untuk mengantisipasi potensi gejolak harga di masa mendatang. Langkah konkrit masih perlu terus dilakukan melalui optimalisasi pemantauan harga dan stok pangan, percepatan kerja sama antar daerah dengan mewujudkan perjanjian kerjasama, pembentukan pusat logistik pangan, meningkatkan intensitas operasi pasar dan gerakan pangan murah, menetapkan peta jalan pengendalian inflasi 2025-2027, optimalisasi gerakan menanam, mengedukasi masyarakat tentang pentingnya diversifikasi konsumsi pangan dan melibatkan media serta platform digital dalam penyampaian informasi terkait tren harga dan upaya pengendalian inflasi.